

SOSIALISASI PENYAMPAIAN LHKPN DI LINGKUNGAN **KEMENTERIAN PERTAHANAN** TAHUN WL 2023

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN
Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring
Komisi Pemberantasan Korupsi

TUJUAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN



Menjaga Integritas para Penyelenggara Negara

Menanamkan sifat kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab

Menghindari potensi konflik kepentingan

Menjadi media kontrol masyarakat

UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme



- Pasal 5 (2) : bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
- Pasal 5 (3) : melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
- Pasal 20 : sanksi administratif bagi yang tidak lapor

UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



- Pasal 7 (1) huruf a: Dalam melaksanakan tugas pencegahan, KPK berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara



- Periode Pelaporan
- Proses Pendaftaran WL
- Verifikasi Administratif
- Pengumuman
- Pemeriksaan
- Partisipasi Masyarakat

Regulasi Lain terkait Pelaporan Harta

Misal : Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)

PENYELENGGARA NEGARA MENURUT UU 28 TAHUN 1999



Pejabat
Negara pada
Lembaga
Tinggi Negara



Menteri



Gubernur



Hakim



Pejabat
negara yang
lain sesuai
dengan
ketentuan



Pejabat lain yang
memiliki fungsi
strategis dalam
penyelenggaraan
negara

DEFINISI

LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara termasuk harta yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara, pasangan, dan anak yang masih dalam tanggungan, yang dituangkan dalam formulir yang telah ditetapkan oleh KPK



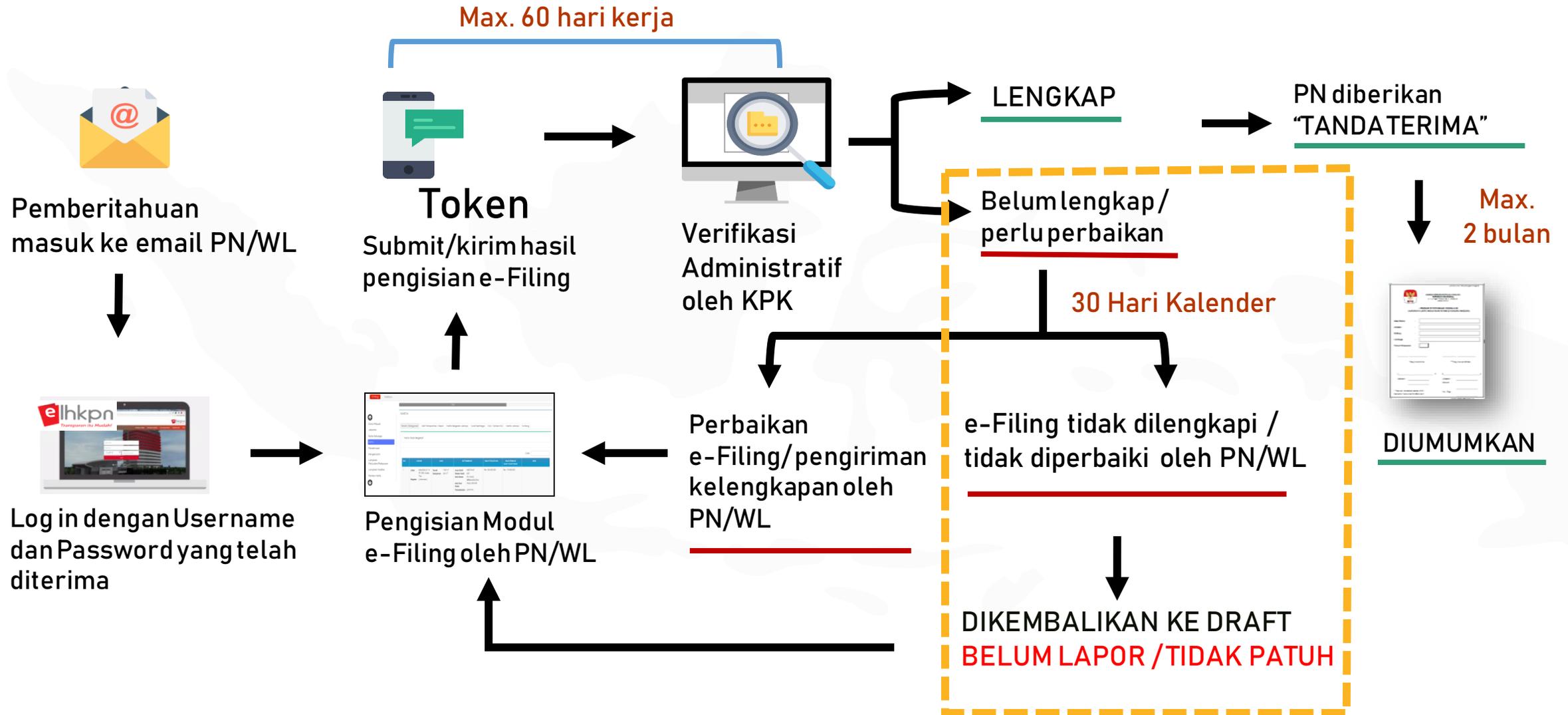
LHKPN

Daftar ini dituangkan ke dalam formulir LHKPN.

<https://elhkpn.kpk.go.id/>



Alur Pelaporan LHKPN



JENIS LAPORAN LHKPN

PERIODIK

Selama Menjabat
1 tahun sekali

1 JAN - 31 MARET

KHUSUS

- ❖ Pertama kali menjabat
- ❖ Berakhir masa jabatan
- ❖ Pengangkatan kembali sebagai PN setelah berakhir masa jabatan

MAKS 3 BULAN
SEJAK DIANGKAT / SEJAK
PENSIUN



+ ISI LHKPN BARU

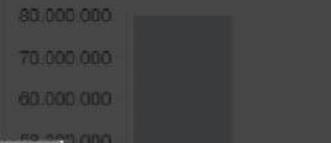
REKAPITULASI HARTA (Rp.)



REKAPITULASI PENERIMAAN (Rp.)



REKAPITULASI PENGELUARAN (Rp.)



BUAT LHKPN BARU

Jenis Laporan ⓘ

Periodik

Khusus

Pilih jenis pelaporan, apakah termasuk jenis pelaporan **“periodik”** atau jenis pelaporan **“khusus”**

Riwayat LHKPN

*Data harta hasil migrasi ya...

Tampilkan 10

No.	Waktu LHKPN	Tanggal Laporan	Jenis Laporan	Status	Aksi
1		05/11/2016		Dead	Online
2		16/05/2017	Khusus, Awal Menjabat	Ditumuhkan	Online

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 baris data

Perfama | Sebelumnya | 1 | Selanjutnya | Terakhir

Data Pribadi

Jabatan

Data Keluarga

Harta

Penerimaan

Pengeluaran

Lampiran
Penjualan/Pelepasan

Lampiran Fasilitas

Review Harta

DATA PRIBADI

Foto ?



 Browse ...

NK ?

0000000000001234

No. KK

Nomor Kartu Keluarga

Nama Lengkap ?

FULAN

Gelar Depan ?

Gelar Belakang ?

MM

NPWP ?

12345678900000

Jenis Kelamin ?

LAKI-LAKI

Tempat Lahir ?

JAKARTA

Tanggal Lahir ?

 31/12/1989

Selanjutnya 

DATA KELUARGA

entry/102253272



Markah Lain

Perkenalan Astra KPK



E-Filing

Mailbox



Data Pribadi

Jabatan

Data Keluarga

Harta

Penerimaan

Pengeluaran

Lampiran

Penjualan/Pelepasan

Lampiran Fasilitas

Review Harta

FORM DATA KELUARGA

Kewarganegaraan *

WNI WNA

Nomor Induk Kependudukan (NIK) *

3362362372457473

sudah benar 16 digit

Nama *

IIT

Hubungan *

ISTRI

Tempat Lahir *

BARANGAN

Tanggal Lahir *

22/07/1993

Umur Saat lapor LHKPN : 46 Tahun 8 Bulan

Jenis Kelamin *

PEREMPUAN

Pekerjaan

IBU RT

Nomor Telepon/Handphone



Alamat *

jalan jalan 2 no 3, Kelurahan HDDH, Kecamatan GAGA,
Kabupaten/Kota DHARMASRAYA, Provinsi SUMATERA
BARAT

sama dengan PN

Klik tombol "simpan"
untuk menyimpan data
anggota keluarga.

Simpan

Batal

2021 Profil Saya TRAINOR
58 PN / WL
LOGOUT

Cari:

AKSI

nya Selanjutnya Terakhir

Sebelumnya Selanjutnya

13

PELAPORAN PERTAMA KALI



E-Filing

Mailbox

Tanggal/Tahun Laporan : 11 November 2019 Jenis Pelaporan : Khusus

- Tanah / Bangunan
- Alat Transportasi / Mesin
- Harta Bergerak Lainnya
- Surat Berharga
- KAS / Setara KAS
- Harta Lainnya
- Hutang

"Harta Tidak Bergerak (Tanah dan/atau Bangunan)"

+ Tambah



Cari:

NO	STATUS	LOKASI	LUAS	KEPEMILIKAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI ESTIMASI SAAT PELAPORAN	AKSI
----	--------	--------	------	-------------	-----------------	-------------------------------	------

Tidak ada data yang ditampilkan

Pertama Sebelumnya Selanjutnya Terakhir

« Sebelumnya Selanjutnya »



Data Pribadi

Jabatan

Data Keluarga

Harta

Penerimaan

Pengeluaran

Lampiran Penjualan/Pelepasan

Lampiran Fasilitas

Review Harta



Negara Asal* INDONESIA Provinsi* DKI JAKARTA Kabupaten/Kota* KOTA JAKARTA SELATAN Kecamatan* 

SETIABUDI

Desa/Kelurahan* 

KUNINGAN

Jalan* 

KUNINGAN PERSADA

Luas Tanah / Bangunan* 160 m² 80 m²

Gunakan titik (.) untuk angka desimal, maksimal 2 angka di belakang titik

Jenis Bukti* SERTIFIKAT Nomor Bukti* 

SHM 09971

Atas Nama*  PN YANG BERSANGKUTAN PASANGAN / ANAK LAINNYAAsal Usul Harta*  1. HASIL SENDIRI 2. WARISAN 3. HIBAH DENGAN AKTA 4. HIBAH TANPA AKTA 5. HADIAH 6. LAINNYAPemanfaatan*  1. TEMPAT TINGGAL 2. DISEWAKAN 3. PERTANIAN / PERKEBUNAN / PERIKANAN /
PERTAMBANGAN 4. LAINNYANilai Perolehan (Rp)* 

100.000.000

Nilai Estimasi Saat Pelaporan (Rp)* 

450.000.000

Tahun Perolehan*

2016

Data ini wajib di isi

PELAPORAN KEDUA DAN SELANJUTNYA



E-Filing

Mailbox

Tanggal/Tahun Laporan : 11 November 2019 Jenis Pelaporan : Khusus

30%



Data Pribadi

Jabatan

Data Keluarga

Harta

Penerimaan

Pengeluaran

Lampiran
Penjualan/Pelepasan

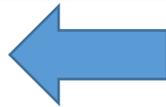
Lampiran Fasilitas

Review Harta



HARTA

Load Semua Data Sebelumnya



Tanah / Bangunan

Alat Transportasi / Mesin

Harta Bergerak Lainnya

Surat Berharga

KAS / Setara KAS

Harta Lainnya

Hutang

"Harta Tidak Bergerak (Tanah dan/atau Bangunan)"

Cari:

NO	STATUS	LOKASI	LUAS	KEPEMILIKAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI ESTIMASI SAAT PELAPORAN	AKSI
----	--------	--------	------	-------------	-----------------	-------------------------------	------

Tidak ada data yang ditampilkan

Pertama

Sebelumnya

Selanjutnya

Terakhir

Sebelumnya

Selanjutnya



Tanah / Bangunan

Alat Transportasi / Mesin

Harta Bergerak Lainnya

Surat Berharga

KAS / Setara KAS

Harta Lainnya

Hutang

"Harta Bergerak (Alat Transportasi dan Mesin Lainnya)"

+ Tambah

Cari:

NO	STATUS				AKSI
1	Lama	Jenis	Merek : HONDA	Asal Usul Harta : HIBAH DENGAN AKTA	  
		Tipe/Model	: VARIO NC110A1C AT	Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN	Ubah Lepas Tetap
		Tahun Pembuatan	: 2011	Pemanfaatan : TIDAK DIGUNAKAN SENDIRI & TIDAK MENGHASILKAN	
		No Pol / Registrasi	: B 3295 SDS	Ket. Lainnya :	
				Tahun Perolehan : 2011	

Pastikan status **Lama** berubah menjadi **Ubah, Tetap, atau Lepas**



Data Pribadi

Jabatan

Data Keluarga

Harta

Penerimaan

Pengeluaran

Lampiran Penjualan/Pelepasan

Lampiran Fasilitas

Review Harta



Penerimaan adalah selama 1 tahun mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember tahun sebelumnya.



JENIS PENERIMAAN

A. Penerimaan Dari Pekerjaan

B. Penerimaan dari Usaha dan Kekayaan

C. Penerimaan Lainnya

NO	JENIS PENERIMAAN	PENYELENGGARA NEGARA	PASANGAN
1	Gaji dan Tunjangan	Rp. 120.000.000	Rp. 0
2	Penghasilan dari Profesi/Keahlian	Rp. 0	Rp. 0
3	Honorarium	Rp. 0	Rp. 0
4	Tantiem, Bonus, Jasa Produksi, THR	Rp. 30.000.000	Rp. 0
5	Penerimaan Pekerjaan Lainnya	Rp. 0	Rp. 0

TOTAL A PENERIMAAN DARI PEKERJAAN = Rp 150.000.000

TOTAL B PENERIMAAN DARI USAHA DAN KEKAYAAN = Rp 0

TOTAL C PENERIMAAN LAINNYA = Rp. 0

TOTAL PENERIMAAN (A + B + C) = Rp. 150.000.000

Simpan

Sebelumnya

Selanjutnya

Pengeluaran adalah selama 1 tahun mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember tahun sebelumnya.



JENIS PENGELUARAN

"Pengeluaran Tunai Setahun (Periode Januari s.d. Desember)"

A. Pengeluaran Rutin

B. Pengeluaran Harta

C. Pengeluaran Lainnya

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL PENGELUARAN
1	Biaya Rumah Tangga (termasuk transportasi, pendidikan, kesehatan, rekreasi, pembayaran kartu kredit)	Rp. 100.000.000
2	Biaya Sosial (antara lain keagamaan, zakat, infaq, sumbangan lain)	Rp. 0
3	Pembayaran Pajak (antara lain PBB, kendaraan, pajak daerah, pajak lain)	Rp. 0
4	Pengeluaran Rutin Lainnya	Rp. 0

TOTAL A PENGELUARAN RUTIN = Rp. 100.000.000

TOTAL B PENGELUARAN HARTA = Rp. 0

TOTAL C PENGELUARAN LAINNYA = Rp. 0

TOTAL PENGELUARAN (A + B + C) = Rp. 100.000.000

Simpan

◀ Sebelumnya

Selanjutnya ▶



Ringkasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara

Klik tombol 'Proses Permintaan Token Untuk Pengiriman LHKPN'

[Sebelumnya](#)[Cetak Ikhtisar Harta](#)[Proses Permintaan Token Untuk Pengiriman LHKPN](#)

1.1 REKAPITULASI HARTA KEKAYAAN PERIODE 2018

1	HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN / ATAU BANGUNAN)	Rp.	10.000.000.000
2	HARTA BERGERAK (ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN)	Rp.	250.000.000
3	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	100.000.000
4	SURAT BERHARGA	Rp.	400.000.000
5	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.420.000
6	HARTA LAINNYA	Rp.	40.000.000
SUB TOTAL HARTA		Rp.	10.793.420.000
7	HUTANG	Rp.	200.000.000
TOTAL HARTA KEKAYAAN		Rp.	10.593.420.000

1.2 REKAPITULASI PENERIMAAN KAS 2018

PENERIMAAN PEKERJAAN PN & PASANGAN	Rp.	400.000.000
PENERIMAAN USAHA / KEKAYAAN PN & PASANGAN	Rp.	25.000.000
PENERIMAAN LAINNYA	Rp.	0
TOTAL PENERIMAAN	Rp.	425.000.000

1.3 REKAPITULASI PENGELUARAN KAS 2018

PENGELUARAN UMUM	Rp.	128.000.000
PENGELUARAN HARTA	Rp.	0
PENGELUARAN LAINNYA	Rp.	0
TOTAL PENGELUARAN	Rp.	128.000.000
PENERIMAAN BERSIH	Rp.	297.000.000



Data Pribadi

Jabatan

Data Keluarga

Harta

Penerimaan

Pengeluaran

Lampiran Penjualan/Pelepasan

Lampiran Fasilitas

Review Harta

IKHTISAR HARTA KEKAYAAN PERIODE 2018

IKHTISAR LHKPN FULANAH 1000000000101010

1. DATA PRIBADI

Nama : FULANAH
NHNK :
Bidang : EKSEKUTIF
Lembaga : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
Jabatan : DATA ENTRY
Tanggal Laporan : 5 November 2018

2. DATA KELUARGA LAINNYA

NO	NAMA	HUBUNGAN DENGAN PN	TEMPAT DAN TANGGA LAHIR/JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT RUMAH
1	FULAN	SUAMI	JAKARTA , 27 Juni 1989 / LAKI-LAKI	SWASTA	JALAN SETIABUDI NO 1, Kelurahan - Kecamatan SETIABUDI, KOTA JAKARTA SELATAN , Provinsi DKI JAKARTA

3. JABATAN

NO	JABATAN - DESKRIPSI JABATAN / ESELON	LEMBAGA	UNIT KERJA	SUB UNIT KERJA
1	DATA ENTRY	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)	DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN	DIREKTORAT PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN LHKPN

4. DATA HARTA

Setuju

Klik tombol 'Selanjutnya'

Beri centang pada bagian "Setuju", lalu klik tombol "Selanjutnya" untuk menampilkan halaman Lampiran 3 - Surat Pernyataan. Beri centang "Setuju" lalu klik tombol "Selanjutnya".



LAMPIRAN 3 - SURAT KUASA MENGUMUMKAN

Dengan menyetujui pernyataan di bawah ini, Saya menyatakan bahwa :

Nama : FULANAH
Tempat / Tanggal Lahir : JAKARTA - 22/07/1970
Nomor KTP / NIK : 1000000000101010
Alamat : JALAN SETIABUDI NO 1 , - , SETIABUDI , KOTA JAKARTA SELATAN , DKI JAKARTA

(Selanjutnya disebut sebagai / "Pemberi Kuasa")

Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengumumkan seluruh harta kekayaan Pemberi Kuasa yang dilaporkan kepada Penerima Kuasa dalam media pengumuman yang ditetapkan oleh Penerima Kuasa.

Sehubungan dengan itu Penerima Kuasa berwenang menghadap dan/atau menghubungi lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah dan/atau pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak lain yang terkait, melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Penerima Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada dibawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.

Pemberi Kuasa,

FULANAH

- Setuju
- Tidak Setuju

Klik tombol 'Selanjutnya'

Selanjutnya

x Batal

Lampiran 3 - Surat Kuasa Mengumumkan wajib disetujui oleh wajib LHKPN untuk mengirimkan LHKPN ini dan tidak perlu dicetak. Beri centang "Setuju" lalu klik tombol "Selanjutnya".



LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Dengan menyetujui pernyataan di bawah ini, Saya menyatakan bahwa :

Nama (Sesuai dengan KTP) : FULANAH
Tempat / Tanggal Lahir : JAKARTA - 22 Juli 1970
Nomor KTP / NIK : 1000000000101010
Alamat : JALAN SETIABUDI NO 1, -, SETIABUDI, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA

(Selanjutnya disebut sebagai / "Pemberi Kuasa")

Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Gedung Merah Putih KPK - Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950, Indonesia yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa")

---KHUSUS---

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa

- Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga / pihak / profesi / instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/atau perusahaan.
- Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga / pihak / profesi / instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/atau pejabat - pejabat yang berwenang maupun pihak - pihak terkait untuk mendapatkan keterangan - keterangan, dokumen - dokumen dan/atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada dibawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.

Pemberi Kuasa,

FULANAH

Setuju

Klik tombol 'Selanjutnya'

Selanjutnya

X Batal

TOTAL PENGELUARAN

Rp.

128.000.000

297.000.000

Lampiran 4 - Surat Kuasa. Beri centang "Setuju" lalu klik tombol "Selanjutnya".



Ringkasan Laporan Harta

1.1 REKAPITULASI HARTA

- 1 HARTA TIDAK BERGERAK (BANGUNAN)
- 2 HARTA BERGERAK (ALAT MESIN)
- 3 HARTA BERGERAK LAINNYA
- 4 SURAT BERHARGA
- 5 KAS DAN SETARA KAS
- 6 HARTA LAINNYA
- SUB TOTAL HARTA
- 7 HUTANG
- TOTAL HARTA KEKAYAAN

Finalisasi Pengiriman LHKPN & Kode Token

Lampiran-4 surat kuasa yang dicetak oleh aplikasi e-Filing LHKPN pada saat proses pengiriman wajib ditandatangani oleh masing-masing baik penyelenggara negara, pasangan (istri/suami) dan seluruh anak dalam tanggungan diatas meterai Rp.6000 dan dikirimkan ke alamat :

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN
Komisi Pemberantasan Korupsi
Gedung Merah Putih KPK - Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950.

Anda akan menerima Kode Token yang dikirim aplikasi e-LHKPN melalui nomor HP **081511000575** dan email **statistik@kpk.go.id**.

Kode Token akan dikirimkan ke Nomor HP dan email Anda yang telah didaftarkan dalam aplikasi e-LHKPN yaitu [REDACTED]. Silakan masukkan pada kotak yang tersedia di bawah ini (pastikan server code sesuai dengan yang ada di email/sms token).

Kode Token* 

Server Code : NZZKAK5J

Belum menerima Token?

Kirim

x Batal

Klik tombol 'Kirim'

Masukkan informasi kode token yang dikirimkan ke email dan atau SMS terdaftar wajib LHKPN. Lalu klik tombol "Kirim".

STATUS LAPORAN

dengan nilai kurs 1 US\$ = Rp. 10.000,-

Tampilkan 10 baris/halaman

Cari:

No.	Nama PN / WL	Tanggal Laport	Jenis Pelaporan	Jabatan	Status Laporan	Laporan Via	Aksi
1	[REDACTED]	05/11/2018	[REDACTED]	[REDACTED]	Draft	Online	   
2	[REDACTED]	16/05/2017	Khusus, Awal Menjabat	[REDACTED]	Diumumkan	Online	  

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 baris data

Pertama [Sebelumnya](#) **1** [Selanjutnya](#) Terakhir

Draft

Status **draft** berarti pelaporan Saudara belum selesai

Proses Verifikasi

Status **proses verifikasi** berarti pelaporan Saudara sedang diverifikasi administratif oleh KPK

Perlu Perbaikan

Status **perlu perbaikan** berarti pelaporan Saudara ada yang perlu perbaikan

Terverifikasi Lengkap

Status **terverifikasi lengkap** berarti pelaporan Saudara sudah terverifikasi administratif

Diumumkan

Status **diumumkan** berarti pelaporan Saudara sudah diumumkan

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini : -----

Nama (sesuai dengan KTP) : BANGUN
Tempat/Tanggal Lahir : PADI / 1 Januari 1969
Nomor KTP/NIK : 3273123000000001
Alamat : jalan kenangann no 20, RELUNG , LUBUK HATI , KOTA LUBUKLINGGAU , SUMATERA SELATAN

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: -----

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa"). -----

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: -----

- Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada: -----
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/ atau perusahaan
- Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada: -----
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa. -----



Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

27-October-2023
Pemberi Kuasa,

Meterai
Rp. 10000,-

(BANGUN)



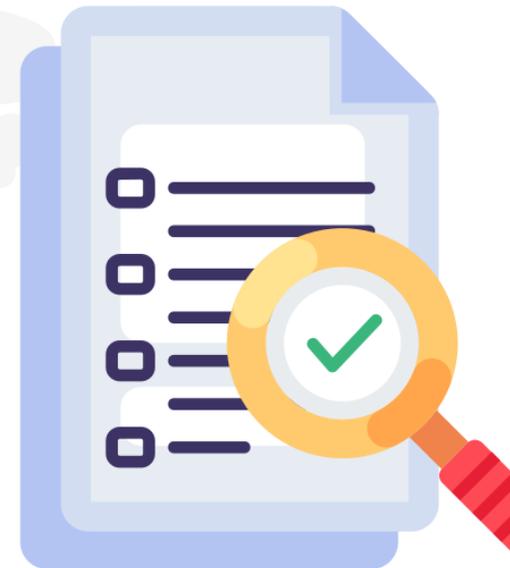
Atas nama PN,
Pasangan & Anak
dalam Tanggungan
berusia > 17 tahun

(dikirimkan dokumen
aslinya ke KPK)

Catatan:
Khusus SK yang
menggunakan e-meterai,
cukup mengirimkan
softcopy melalui email
sk.elhkpn@kpk.go.id

PROSES VERIFIKASI ADMINISTRATIF

- KPK melakukan verifikasi administratif terhadap seluruh LHKPN yang disampaikan.
- Aspek yang dicek :
 - Kelengkapan Surat Kuasa Perbankan (Lampiran 4); dan
 - Kewajaran isian LHKPN (data keluarga, nilai pelaporan, penerimaan atau pengeluaran).
- Per 1 Januari 2023, KPK telah mengimplementasikan metode verifikasi otomatis pada saat proses submit LHKPN di e-Filing, yaitu dengan mengecek:
 - Kelengkapan SK berdasarkan *tagging* pada pelaporan sebelumnya;
 - Adanya anomali nilai pelaporan harta, penerimaan, dan pengeluaran berdasarkan hasil analisis *Machine Learning* (AI).



1. Surat Kuasa Belum Lengkap/Tidak Sesuai

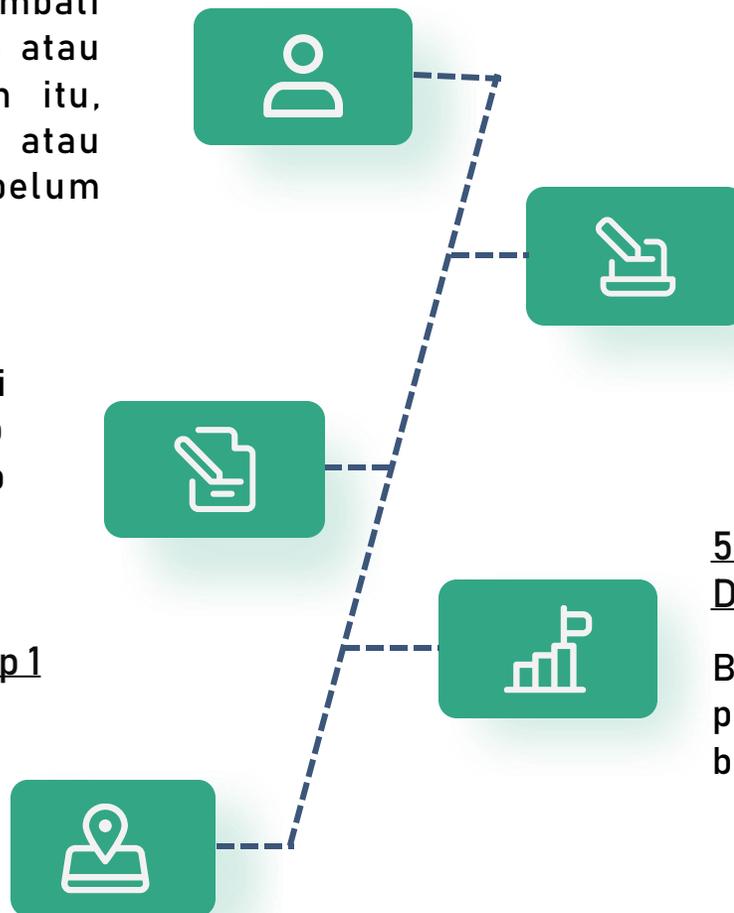
Pengiriman Surat Kuasa perlu dilakukan kembali jika ada perubahan data keluarga (Pasangan atau Anak yang Baru berusia 17 Tahun). Selain itu, seringkali surat kuasa tidak ditandatangani atau tandatangan tidak sesuai – Silakan Discan sebelum kirim.

2. Nilai Pelaporan Salah Input

Wajib LHKPN sering salah input angka dari seharusnya Rp 1.000.000.000 menjadi Rp 1.000.000.000.000 atau sebaliknya dari Rp 100.000.000 menjadi Rp 100

3. Terdapat Harta Yang Dilaporkan dengan Nilai Rp 1

Banyak Wajib LHKPN yang mencantumkan nilai saldo rekening yang dimiliki dengan nilai Rp 1 atau nilai transaksi terakhir di rekening tersebut. Termasuk melaporkan Harta/Utang dengan Nilai Rp 1 padahal maksudnya adalah asset tersebut sudah dijual atau tidak dimiliki



4. Hanya Mencatatkan Nilai Utang dan Kas saja

Banyak Wajib LHKPN yang hanya mencantumkan nilai utang saja tanpa menginputkan harta yang diperoleh dari hasil utang tersebut.

5. Penerimaan dan Pengeluaran Hanya Dihitung Satu Bulan

Banyak Wajib LHKPN yang salah hitung penerimaan dan pengeluaran hanya satu bulan saja seharusnya SATU TAHUN

PIC KPK

ABRORYN : / Abrory.Nasrullah@kpk.go.id

Call Center : 198

Email Layanan : elhkpn@kpk.go.id

Email Pengiriman SK e-meterai :

sk.elhkpn@kpk.go.id

KOORDINASITATAP MUKA

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi

Jalan HR. Rasuna Said Kav. C1, Setiabudi, Jakarta

Selatan 12950

PENGIRIMAN SURAT KUASA & FORM AKTIVASI

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

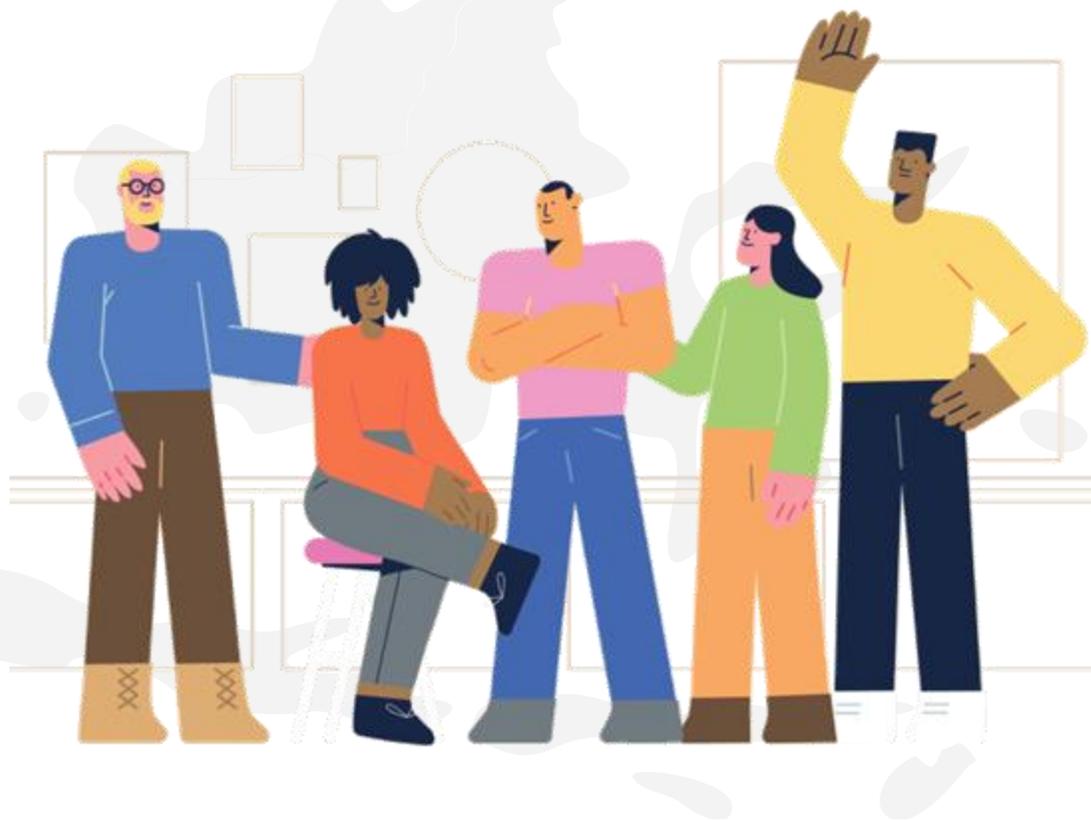
Gedung Merah Putih KPK

Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta

Selatan 12950

<https://elhkpn.kpk.go.id>

TERIMA KASIH



<https://elhkpn.kpk.go.id>